



► PILKADA 2017

Kampanye Ditutup Doa Bersama dan Deklarasi Damai

Sekar Langit Nariswari
& Ujang Hasanudin
redaksi@harianjogja.com

KULONPROGO—Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017, pasangan calon (paslon) peserta Pilkada telah mengakhiri masa kampanye pada Sabtu (11/2). Di Jogja paslon peserta Pilkada mengadakan Deklarasi Damai. Di Kulonprogo, paslon peserta Pilkada menutup masa kampanye dengan menggelar doa bersama.

Mereka juga sekaligus mengklarifikasi isu *money politics* yang merundung. Tim Pemenangan Zuhadmono-Iriani, Yusrin Martofa mengatakan doa bersama masyarakat digelar di Jatimulyo, Giri-mulyo dan Glagah, Temon, Kulonprogo. "Kampanye terbuka terbatas pagi di Jatimulyo sementara malam di Glagah," ujarnya kemarin.

Adapun terkait praktik politik uang di Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan, Yusrin mengatakan hal tersebut menjadi *black campaign* yang merugikan paslon 1. Ia bahkan mempertanyakan ada skenario apa yang sedang dijalankan. Pasalnya, biskuit yang diper-masalahkan dibagikan kepada warga, dikatakan sebagai gizi tambahan yang dialokasi di Posyandu.

● Lebih Lengkap Halaman 9

Kampanye Ditutup...

Sedangkan uang yang diberikan juga dimaksudkan sebagai biaya konsumsi kegiatan...

"Memfasilitasi kegiatan, bukan mengajak, apalagi menjanjikan macam-macam," tegas dia. Selain itu, baik uang dan biskuit tersebut tidak diberikan dalam waktu yang bersamaan sehingga tidak bisa dikategorikan sebagai *money politics* alias politik uang.

Yusrin meminta Panwaslu untuk memastikan objektivitas berjalan dan melakukan klarifikasi kepada pihak terkait. Ketua Panwaslu Kulonprogo, Tamyus Rochman menjelaskan pihaknya menerima informasi mengenai adanya pembagian kalender, biskuit, dan uang dari salah satu pasangan calon (paslon) bupati dan wakil bupati Kulonprogo di wilayah Krembangan.

Pemberian tersebut tersebar di 12 dusun dan juga telah diamankan sebagai barang bukti. "Jumlah barangnya belum kami total karena ini baru dari dusun V dan XII. Kalau wangnya tadi Rp30.000 di Dusun V dan Rp150.000 di Dusun XII," ungkap Tamyus.

Tamyus memaparkan, pihaknya masih perlu mengumpulkan keterangan dari saksi dan bukti penguat lainnya. Jika terbukti sebagai praktik politik uang, pelaku dapat dikenakan Pasal 187 A Undang-Undang No.10/2016 dengan ancaman pidana penjara selama tiga hingga enam tahun dan denda sebesar Rp200 juta sampai Rp1 miliar.

	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1...	☐ Negatif	☐ Amat Segera	☐ Untuk Ditangga
2...	☐ Positif	☐ Segera	☐ Untuk Diketahui
3...	☐ Netral	☐ Biasa	☐ Jumpa Pers
5...			

2

Terancam Sanksi

Di Jogja, Pejabat Wali Kota Jogja, Sudibyo menanti proses pemilihan wali kota dan wali kota (Pilwalkot) Jogja aman dan damai sampai terpilihnya wali kota definitif.

"Saya punya komitmen untuk memfasilitasi dan menjaga agar pemilihan wali kota ini berjalan lancar dan damai," kata Suli saat menghadiri Deklarasi Jogja Damai di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jogja.

Dalam Deklarasi Jogja Damai yang diselenggarakan KPU tersebut juga dihadiri dua pasangan calon (Paslon) wali kota dan wakil wali kota beserta para pendukungnya. Suli juga mengajak semua warga kota yang mempunyai hak pilih untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 15 Februari mendatang.

Ketua KPU Kota Jogja, Wawan Budianto mengatakan Deklarasi Jogja Damai merupakan bagian dari rasa syukur atas terselenggaranya kampanye damai yang sudah berlangsung selama 107 hari. Ia menilai dalam proses kampanye tidak menemukan pelanggaran dari kedua belah pihak paslon dan tidak ada gangguan berat. Wawan mengapresiasi kedua paslon yang bisa menjaga situasi aman dan damai selama masa kampanye. Namun demikian proses pilwalkot masih belum selesai. Ia berharap komitmen damai itu tetap terjaga sampai terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jogja periode 2017-2022.

Dalam kesempatan itu, kedua paslon juga kembali menyampaikan komitmen mereka menjaga kedamaian sampai proses Pilwalkot selesai. "Kami siap menciptakan pilkada

berjalan aman, tertib, serta damai demi terwujudnya kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat kota Jogja," kata Inam Priyono, Calon Wali Kota nomor urut satu saat membacakan deklarasinya.

Calon Wali Kota Nomor Dua, Haryadi-Soyi menyatakan pilwalkot sampai pemungutan suara nanti berjalan, aman, tertib, dan lancar. "Audi dari politik yang dan juga saya-saya yang mengintimidasi dan mengkompilasi pada masyarakat," kata Haryadi.

Anggota Pengawas Kota Jogja, Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga, Iwan Ferdian mengingatkan semua pasangan calon dan pendukungnya untuk tidak melakukan kampanye dalam bentuk apa pun selama masa tenang berlangsung mulai 12 Februari sampai sehari menjelang pemungutan suara.

Jika hal itu dilanggar, kata dia, maka bisa terkena sanksi. "Sanksinya sudah jelas pidana karena melakukan kampanye diluar jadwal, sudah diatur dalam Undang-Undang No.1/2015," kata Iwan, kemarin. Pihaknya juga siap memperketat pengawasan selama masa tenang. Diketahui sanksi dalam UU No.1/2015 tentang Pilkada ada di Pasal 187 berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal pemilu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 hari atau paling lama tiga bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000 atau paling banyak Rp1.000.000.

Pengusiran Jurnalis

Di Jakarta, Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal M. Irtawan mengucapakan terima kasih kepada peserta aksi 112 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu, (11/2). Menurut dia, kegiatan ini berjalan aman, lancar, tertib, dan kondusif.

Dia mengatakan mulai hari ini, Minggu (12/2), pelaksanaan Pilkada 2017 telah memasuki masa tenang. Masa tenang ini berlangsung hingga 14 Februari. "Sehingga kami berharap tak ada lagi kegiatan pengumpulan massa," kata Irtawan di Masjid Istiqlal, kemarin.

Ribuan orang dalam mengikuti Aksi 112 di Masjid Istiqlal mulai Sabtu dinihari. Kegiatan ini juga dihadiri Rizieq Shihab dan dipandu oleh Sekretaris Jenderal Forum Unsat Islam (FUI) Muhammad Al Khatibath.

Dalam kegiatan itu, Al Khatibath menyerukan agar penegak hukum menjerakan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahjaja Purnama alias Ahok atas dugaan penistaan agama. Massa juga diarak agar memilih kepala daerah beragama Islam dalam ajang Pilkada serentak 15 Februari 2017.

Selain itu, Al Khatibath mengajak massa bersumpah untuk memenangkan gubernur yang sesuai dengan kriteria MUI (Majelis Ulama Indonesia). "Yaitu pemimpin muslim yang beriman dan bertakwa pada Allah SWT," katanya. "Semoga Allah jadi saksi atas apa yang aku ucapkan," katanya.

Meski Kapolda Metro Jaya telah mengucapakan terima kasih, aksi 112 di Masjid Istiqlal sebenarnya diwarnai dengan adegan pengusiran dan pemukulan terhadap jurnalis. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (ITJI) Pusat mengesalkan dan mengukuhkan aksi itu dan meminta polisi serius menangani kasus ini.

ITJI dan Satgas Anti-Kekerasan Dewan Pers akan melakukan advokasi dan penyelidikan atas tindakan yang dilakukan sejumlah oknum saat aksi damai. "Kami menilai ada dua peristiwa hukum yang terjadi. Pemukulan adalah delik umum yang legal standing-nya berada pada korban langsung bukan pada persisahan," kata Ketua Umum ITJI, Yadi Hendriana, kemarin.

Alansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta juga mengesalkan intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis Metro TV dan seorang jurnalis Global TV. "Tindakan kekerasan terhadap jurnalis jelas melawan hukum dan mengancam kebebasan pers," kata Ketua AJI Jakarta Ahmad Nurhasim.

AJI Jakarta mendorong jurnalis yang menjadi korban untuk melaporkan kasus kekerasan ini ke kepolisian agar bisa diungkap. AJI juga mengimbau para jurnalis mengutamakan keselamatan saat meliput aksi massa, yang berpotensi konflik, dan tak mengabaikan para jurnalis.

Hasim menuturkan tindakan intimidasi dan kekerasan terhadap jurnalis yang sedang bekerja benteng dengan UU Pers No.40/1999. Selain itu tindakan kekerasan ini mencerminkan pelaku tidak menghargai dan menghormati profesi jurnalis. Padahal jurnalis dilindungi UU Pers dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik.

Kasus kekerasan ini bermula saat dua jurnalis Metro TV, Desi Bo (reporter) dan Ucha Fernandes (kameramen), sedang meliput aksi 112 pukul 11.00 WIB di sekitar Masjid Istiqlal. Tiba-tiba kerumunan massa mengusir mereka.

Dari keterangan yang dikumpulkan oleh AJI Jakarta, kedua jurnalis Metro TV ini saat itu mengambil gambar di depan pintu masuk Al Fatah Masjid Istiqlal di sisi timur laut, seberang Gereja Katedral. Belum sempat masuk, terdengar suara orang yang mengusir mereka.

Lalu keduanya digiring oleh massa dan diarak maki, di intimidasi, dan di suruh keluar dari lingkungan masjid. Ucha Fernandes dipukul perut, leher, dan kakinya. Sedangkan kepala Desi dipukul pakai bambu dan terhuka. Beruntung keduanya bisa dikeluarkan dari kerumunan massa.

Juru kamera Global TV Dino juga diintimidasi saat meliput aksi tersebut. Dia dituduh tidak sopan saat menyebut nama pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, tanpa menyertakan sebutan Habib. Massa memaksa dia untuk menambahkan kata Habib saat menyebut Rizieq Shihab. Kasus lainnya, pada Jumat malam, (10/2), mobil Kompas TV diusir oleh massa 112 dari lingkungan Masjid Istiqlal. (Liputan6.com/Detik/Tempo.com)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 04 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005